

**PERJALANAN KEMENANGAN POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(STUDI KASUS POLITISI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA)**

Tiara Febriana*), Laila Kholid Al Firdaus***)
Email : tfebriana36@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sebagai negara yang demokrasi sudah seharusnya Indonesia memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan di dalam politik. Penelitian ini berfokus pada cerita perjalanan kemenangan politisi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori psikologi politik, partisipasi politik perempuan dan *struggle for power* terhadap modalitas dan strategi pemenangan politisi dalam pemilihan umum legislatif. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor dari terbentuknya sikap politik politisi dan perilaku memilih. Sikap politik Yuke Yurike dan Wa Ode Herlina berasal dari keyakinan politik yang dimiliki, seperti pandangan, nilai, sikap, pengalaman dan peran di masyarakat. Sedangkan, perilaku memilih terhadap Yuke Yurike dan Wa Ode Herlina mayoritas terbentuk melalui pendekatan politik, sosiologis, dan psikologis. Selain itu, investasi sosial sebagai bentuk dari *struggle for power* modalitas sosial yang paling kuat dimiliki oleh Yuke Yurike dan Wa Ode Herlina serta strategi pemenangan berupa kampanye konvensional yang menyebar dan konsistensi merawat konstituen menjadi strategi prioritas terhadap kemenangan Yuke Yurike dan Wa Ode Herlina di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : Kesetaraan gender, keterwakilan perempuan, perilaku memilih, dan pemilu legislatif

**THE JOURNEY OF VICTORY OF FEMALE POLITICIANS IN THE LEGISLATIVE ELECTIONS
(CASE STUDY OF POLITICIANS FROM PDI-P FACTION IN THE REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVE COUNCIL OF DKI JAKARTA PROVINCE)**

Tiara Febriana*), Laila Kholid Al Firdaus**)
Email : tfebriana36@gmail.com

**Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University**

Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

As a democratic country, Indonesia should provide opportunities for women to play a role in politics. This study focuses on the story of Woman Election Winning in the Regional People's Representative Council of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of political psychology, women's political participation and struggle for power on the modalities and winning strategies of politicians in legislative elections. This study will use a qualitative descriptive research method with in-depth interview techniques and literature studies as data collection techniques. The results of the study found that there are several factors in the formation of political attitudes and voting behavior. Yuke Yurike and Wa Ode Herlina political attitudes come from their political belief, such as views, values, attitudes, experiences and roles in society. Meanwhile, the voting behavior towards Yuke Yurike and Wa Ode Herlina was mostly formed through political, sociological, and psychological approaches. In addition, social investment as a form of struggle for power, the strongest social modality owned by Yuke Yurike and Wa Ode Herlina, and the winning strategy in the form of a conventional campaign that spreads and consistently cares for constituents became a priority strategy for the winning of Yuke Yurike and Wa Ode Herlina in the Regional People's Representative Council of DKI Jakarta Province.

Kata Kunci : Gender equality, women's representation, voting behavior, and legislative elections

PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa dalam memperebutkan kursi legislatif pada pemilihan umum (pemilu) bukanlah suatu hal yang mudah. Khususnya pada kasus perempuan yang ingin ikut memperebutkan posisi tersebut sebagai bentuk dari keterlibatan partisipasi perempuan di bidang politik. Dalam keterlibatan partisipasi politik, perempuan memiliki cerita perjuangan yang panjang dan rumit demi mendapatkan hak politiknya di Indonesia.

Jika diceritakan secara historis, pemilu legislatif pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yang masih berbentuk sangat sederhana baik dari segi regulasi, strategi ataupun persaingan antar peserta kontestasi. Keterlibatan perempuan dalam hal politik, yakni perempuan sebagai peserta kontestasi pemilu legislatif memerlukan berbagai usaha serta perjuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kandidat peserta laki-laki. Hal ini dilatarbelakangi oleh lahirnya budaya patriarki sejak negara Indonesia belum merdeka, sehingga membuat nasib kaum perempuan sering kali mendapatkan diskriminasi oleh kaum laki-laki.

Situasi politik Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini pada dasarnya sudah mengalami kemajuan terhadap pengakuan hak-hak politik kaum perempuan, yang diatur dalam berbagai regulasi mengenai peran perempuan dalam bidang politik. Salah satunya ialah aturan mengenai kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan yang tertuang dalam beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Partai Politik. Meskipun hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik telah diakui, bahkan ketika perempuan benar-benar terlibat dalam politik, keterlibatan aktif mereka tidak dapat dengan mudah diwujudkan. Sebagai warga negara, perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh proses demokrasi (Soetjipto, 2005: 24-27). Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan kenyataan di lapangan sehingga banyak faktor yang menjadi kendala dan menjadikan peran perempuan kurang optimal di bidang politik dalam negara.

Mayoritas di negara yang masih berkembang, partisipasi politik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini juga termasuk menjadi hambatan karena lebih banyak perempuan yang memilih terlibat dalam persoalan internal keluarga dibandingkan dengan persoalan politik dan negara (Muawanah, 2009: 157).

Keterbatasan akses merupakan salah satu hambatan lainnya yang dihadapi perempuan dalam membuktikan bahwa sistem politik tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan kaum laki-laki saja. Selain itu, perempuan juga tidak diberi kuota, kualitas dan tanggung jawab yang signifikan dalam hal politik sebagai anggota dewan di parlemen. Situasi ini menghambat berkembangnya organisasi perempuan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus diberi ruang politik yang luas untuk berkembang.

Untuk mendobrak segala keterbatasan tersebut perempuan perlu berusaha untuk mengumpulkan berbagai kekuatan demi memperjuangkan hak politiknya dalam keterlibatan partisipasi politik di pemilu legislatif, yakni salah satunya ialah kekuatan dari partai politik karena salah satu faktor pendukung kemenangan dalam kontestasi pemilu legislatif ialah berasal dari elektabilitas partai politik tersebut di suatu wilayah masyarakat. Namun, perlu diingat juga bahwa masih ada banyak faktor usaha atau kekuatan lain dalam perjuangan untuk memenangkan kontestasi tersebut, seperti modalitas dan strategi.

Salah satu partai politik yang sudah terbukti akan kekuatan elektabilitasnya serta memiliki angka keterlibatan perempuan paling besar di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P merupakan partai yang sering memenangkan kontestasi politik serta memiliki kandidat politik perempuan paling banyak dalam pemilu, terkhusus di daerah Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Pada pemilu legislatif dua periode terakhir PDI-P selalu memenangkan perolehan suara dan kursi terbanyak di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data hasil dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), pemilu legislatif anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 PDI-P memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 1.231.843 dengan jumlah kursi sebanyak 28 (27%) kursi dari total 106 kursi. Sedangkan, pada tahun 2019 PDI-P memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 409.721 dengan jumlah kursi sebanyak 25 (24%) kursi dari total 106 kursi.

Selain itu, jika dilihat dari persentase posisi keterlibatan perempuan dalam kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta ialah pada pemilu legislatif tahun 2014 jumlah dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 19 perempuan (18%) dari total 106 kursi yang ada, dan partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan paling banyak ialah PDI-P dengan

rincian sebanyak 10 perempuan (40%) dan 15 laki-laki (60%). Kemudian, pada tahun 2019 jumlah dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah sebanyak 23 perempuan (21,7%) dari total 106 kursi yang ada, dan partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan paling banyak ialah PDI-P dengan rincian sebanyak 11 perempuan (44%) dan 14 laki-laki (56%).

Dari kedua fenomena yang telah disertai dengan data dan persentase tersebut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu dua periode terakhir, yakni pada pemilu legislatif tahun 2014 dan 2019 keterlibatan partisipasi perempuan di DPRD DKI Provinsi Jakarta belum mencapai 30%. Namun, pada rentang waktu dua periode tersebut jumlah dewan perempuan di partai politik PDI-P selalu mencapai kuota 30%. Selain itu, PDI-P memang memiliki strategi kemenangan sendiri yang sangat baik yang terorganisir sehingga dapat memperoleh kemenangan kursi legislatif di DPRD Provinsi DKI Jakarta dua periode berturut-turut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang sangat menarik untuk diteliti sehingga pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang cerita perjuangan politisi perempuan yang berasal dari partai tersebut sebagai bentuk keterlibatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, yakni Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2014 dan 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana *struggle for power* yang dihadapi dari segi modalitas, strategi kemenangan dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemenangan politisi perempuan Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike di DPRD Provinsi DKI Jakarta?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis adalah untuk menganalisis tentang *struggle for power* yang dihadapi dari segi modalitas, strategi kemenangan dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemenangan politisi perempuan Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KERANGKA TEORI

Psikologi Politik dalam Pemilihan Umum

Psikologi politik pada dasarnya bukan turunan dari ilmu psikologis, melainkan hasil dari perkawinan antara ilmu psikologi dengan ilmu politik (Deutsch & Kinvall, 2001). Oleh karena itu, kedua ilmu tersebut saling memengaruhi seperti dalam proses psikologi memengaruhi proses politik dan begitu sebaliknya. Untuk menguasai psikologi politik secara utuh, di satu sisi harus mengetahui dunia politik, baik teori maupun praktiknya, dan di sisi lain harus mengetahui psikologi dengan baik (Tjost & Sidanius, 2004: 3).

Topik penelitian psikologi politik dalam konteks pemilihan umum (pemilu) diantaranya mengenai sikap politik politisi dan perilaku memilih. Terdapat tiga asumsi yang mendasari terbentuknya sikap politik politisi (Josh & Sidanius. 2004). Pertama, secara implisit sikap politik seorang politisi memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga dalam proses pengambilan keputusan bersifat subjektif. Kedua, sikap politik seorang politisi bersumber dari keyakinan politik (*political belief*) yang dipercaya, sehingga dapat memengaruhi kognisi, afeksi dan perilaku politisi. Ketiga, sikap politik seorang politisi juga bisa dilatarbelakangi oleh homogenitas kelompok sendiri (*ingroup homogeneity*) melalui nilai, sikap, dan perilaku kelompok, sehingga bertujuan untuk memprioritaskan kepentingan kelompok.

Perilaku memilih dalam konteks pilihan politik cenderung memilih berdasarkan beberapa identifikasi terhadap para politisi. Terdapat tiga pendekatan yang menjadi faktor terbentuknya perilaku memilih dalam pilihan politik, sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis (Lazarsfeld, dkk. 1954): Berdasarkan status sosial & ekonomi, komunitas agama, lokasi perumahan (homogenitas politik) dan interaksi personal.
2. Pendekatan politik (Campbell, dkk. 1954, 1960, 1966): Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap politisi atau partai politik (kinerja politisi atau partai politik).
3. Pendekatan kognisi (Houghton. 2009): Berdasarkan keyakinan personal melalui pengolahan informasi yang diterima terhadap politisi melalui media daring (kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, kemampuan ekonomi).

Selain itu, secara spesifik melalui pendekatan psikologis dalam pilihan politik menurut Downs (1957) dalam *The Rational Voter Models* menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih didasarkan dengan faktor yang rasional, seperti para pemilih akan memilih kandidat yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan paling besar. Pemilih cenderung akan mengevaluasi dan membandingkan antar kandidat sebelum memutuskan, seperti dari segi kinerja, status petahana, dan lainnya. Kinder & Kiewit (1981) juga menyebutkan bahwa dalam *The Rational Voter Models* terdapat dua perhatian utama yang menjadi landasan tujuan memilih, yakni kandidat mana yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi (*economic voting*) dan kesejahteraan masyarakat (*sociotropic voting*) lebih besar kedepannya.

Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum

Herbert Mc Cloksy menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga secara sukarela yang melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan umum dan dalam pemilihan penguasa (Budiarjo, 2008). Partisipasi politik perempuan merupakan suatu kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung membentuk suatu komunitas politik perempuan yang terdiri dari berbagai unsur seperti aktivis, pengamat politik, pengajar, kader partai politik dan sebagainya. Sehingga, dalam komunitas tersebut kaum perempuan dapat mengambil peran dalam proses pembuatan kebijakan publik (Warjiyati, 2016).

Secara historis budaya, Indonesia merupakan negara yang menganut nilai patriakal sejak masa kolonialisme. Menurut Saptari (1997) nilai patriakal dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang diatur oleh laki-laki melalui institusi sosial, politik, ekonomi, dan agama. Sistem ini bersifat hierarkis, agresif, dan muncul secara independen dari perubahan sosial, seperti sistem kapitalisme yang membagi sektor domestik dan publik. Sistem ini memungkinkan laki-laki menjadi lebih dominan di sektor publik dibandingkan dengan Perempuan (Gamble, 2010). Oleh karena itu, budaya yang telah mengakar sejak masa lampau tersebut menjadi salah satu hambatan untuk merealisasikan partisipasi perempuan dalam hak-hak politiknya.

Pada tahun 1955 atau orde lama pemilu dilaksanakan secara demokratis yang didasarkan atas kemampuan individu setiap caleg, sehingga partisipasi perempuan mengalami peningkatan. Namun, pada masa orde baru pemilu dilaksanakan berdasarkan kepentingan elit politik

saja sehingga partisipasi perempuan dalam politik mengalami penurunan.

Sebagai bentuk kompensasi atas diskriminasi terhadap nasib kaum perempuan yang telah terjadi selama ini, sudah seharusnya pemerintah membuat suatu kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative action*). Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 yang mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga, pada pemilu tahun 2004 partisipasi perempuan dalam politik kembali mengalami peningkatan.

***Struggle for Power* Politisi dalam Pemilihan Umum**

Struggle for power menurut Wolfensberger (2011) ialah “*the struggle for power in order to influence policy, and to determine how resources are allocated*” (perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, dan untuk menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan). *Struggle for power* dapat diartikan sebagai inti dari tujuan kegiatan politik, yaitu suatu upaya untuk memperoleh kekuasaan. Dampak dari adanya *struggle for power* tersebut ialah menimbulkan pertentangan (*contention*), tindakan memperebutkan sesuatu (*contestation*) dan persaingan (*competition*). Dalam konteks pemilihan umum, para kontestan politik berjuang untuk memenangkan suatu kekuasaan yang diinginkan (eksekutif dan legislatif). Oleh karena itu, pada pelaksanaan pemilihan umum kerap terjadi suatu pertentangan, perebutan, dan persaingan kekuasaan antar kandidat politik yang dilatarbelakangi oleh berbagai bentuk usaha seperti, niat serta semangat yang besar, mental individu yang kuat, waktu yang tidak sedikit, modal dan strategi yang tepat dalam berjuang untuk memenangkan kontestasi politik tersebut.

Modal merupakan hal yang vital dalam kontestasi politik. Penggunaan modal dalam pemilihan umum dapat menjadikan setiap kandidat yang bertarung dalam kontestasi politik mempunyai kesempatan yang sama karena kepemilikan modal yang berbeda antara satu calon kandidat dengan yang calon kandidat lain (Baharuddin dan Purwaningsih, 2017). Buku *The Form of Capital* menjelaskan bahwa modal terbagi atas tiga jenis yang terbagi atas ranah yang berbeda satu sama lain, yaitu modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi (Bourdieu, 1986).

Modal budaya menurut Baharuddin dan Purwaningsih (2017) menyatakan beberapa indikator di dalam modal budaya, antara lain:

1. Wawasan dan pemahaman *cultural and art* secara objektif
2. Preferensi personal tentang *cultural taste*
3. Gelar Universitas atau pangkat tertentu
4. Pengetahuan *practical* dan keahlian tentang budaya.
5. Pemahaman mengenai etika, dan moral.

Modal sosial dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari relasi sosial yang dimiliki seorang calon kandidat yang kemudian menjadi jaringan sosial yang dapat terbagi menjadi jaringan partai atau jaringan non partai, jaringan keluarga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat, dan kepengurusan di dalam organisasi (Ramadhani dan Rahmawati, 2020).

Field (2003) dalam Rafsanjani (2023) menyatakan bahwa modal ekonomi merupakan akar dari setiap modal-modal yang bermain dalam kepemilikan modal calon kandidat kontestasi politik dan dijelaskan bahwa kekuatan secara finansial yang dimiliki setiap calon kandidat dalam kontestasi politik merupakan pemahaman mengenai modal ekonomi oleh Field. Modal ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai ‘penggerak’ terhadap mesin politik yang digunakan setiap kandidat dalam kontestasi politik (Baharuddin dan Purwaningsih, 2017).

Strategi politik dapat didefinisikan sebagai rencana-rencana yang tersusun dan terdapat tindakan yang terukur untuk memenangkan kontestasi politik (Prihatmoko, 2008). Terdapat dua bentuk strategi politik yang digunakan untuk kontestasi politik, yakni strategi ofensif dan strategi defensif (Schroder, 2008). Strategi ofensif adalah strategi memperluas dan menembus pasar politik. Sedangkan, strategi defensif adalah strategi yang bertujuan untuk melindungi pasar, dan strategi untuk menutup atau menyerahkan pasar politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perjuangan kemenangan politisi perempuan fraksi PDI-P di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2014 dan tahun 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, lampiran dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh peneliti setelah melalui tahap penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjalanan Kemenangan Yuke Yurike Tahun 2014

Ketertarikan Yuke terhadap hal-hal politik dimulai dari sikap kritis yang dimiliki oleh Yuke. Yuke dan ayahnya sering berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di masyarakat terutama yang bersifat politik. Berangkat dari intensnya kegiatan diskusi tersebut akhirnya Yuke dikenalkan oleh salah satu kerabat ayahnya di DPR RI, yakni Maruarar Sirait untuk menjadi partner diskusi Yuke. Yuke mulai sering diajak mengikuti berbagai macam kegiatan sosial dan politik, yang akhirnya Yuke bergabung dengan salah satu sayap partai dari PDI-P yakni taruna merah putih. Selanjutnya, Yuke bergabung dengan PDI-P dan masuk ke dalam struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P.

Awal perjalanan karir politik Yuke dimulai pada tahun 2009 ketika Yuke dicalonkan oleh internal partai untuk mengikuti kompetisi legislatif. Yuke dicalonkan untuk menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 7 yang meliputi wilayah Karawang, Purwakarta, dan Bekasi serta mendapatkan nomor urut 6. Namun, pada kesempatan pertama tersebut Yuke belum beruntung untuk memenangkan kontestasi. Yuke kembali mengikuti kompetisi legislatif di tahun 2014 dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan dapil 8 Jakarta Selatan yang meliputi wilayah Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Jagakarsa serta mendapatkan nomor urut 2. Dengan sekali percobaan mencalonkan diri di DPRD Provinsi DKI Jakarta, akhirnya Yuke berhasil memenangkan kontestasi legislatif tersebut.

Terdapat beberapa faktor internal partai PDI-P dalam mencalonkan Yuke sebagai caleg saat pertama dan kedua kalinya. Pertama, PDI-P merupakan salah satu partai yang sangat peduli terhadap kader perempuan sehingga partai selalu memenuhi kuota perempuan 30% dalam pemilu. Kedua, Yuke merupakan kader perempuan yang memiliki loyalitas dan dedikasi sangat tinggi terhadap internal partai. Ketiga, Yuke termasuk kader perempuan yang sangat potensial, walaupun terbilang masih pemula sebagai caleg. Yuke dianggap memenuhi seluruh kualifikasi internal partai sebagai caleg yang akan diusung.

Selain itu, terdapat beberapa faktor kegagalan Yuke. Pertama, pencalonan tersebut dilakukan oleh internal partai untuk memenuhi kuota perempuan, sehingga Yuke mengikuti kompetisi tersebut dengan kurang

persiapan karena bisa dibilang bahwa hal tersebut cukup mendadak bagi Yuke. Kedua, posisi Yuke sebagai caleg pada saat itu belum menjadi prioritas internal partai dalam pemilu legislatif, sehingga Yuke lebih sulit untuk bersaing dengan kompetitor internal maupun eksternal partai. Ketiga, saat itu Yuke diberikan nomor urut 6 sedangkan hanya ada 2 kursi untuk perempuan di fraksi PDI-P DPR RI dan Yuke diberikan daerah pemilihan yang diluar dari domisili Yuke. Keempat, kondisi pribadi Yuke yang pada saat itu sedang hamil membuat Yuke tidak bisa banyak melakukan kegiatan politik seperti pemetaan, penjaringan, kampanye, pengawalan suara dan sebagainya secara intens selama pemilu berlangsung.

Berdasarkan teori tiga asumsi yang mendasari terbentuknya sikap politik politisi (Josh & Sidanius. 2004). Alasan atau keputusan Yuke untuk kembali menjadi caleg di pemilu tahun 2014 pasca kegagalan di pemilu sebelumnya termasuk ke dalam alasan yang bersumber dari asumsi keyakinan politik yang dipercaya (*political belief*) meliputi pandangan, nilai, sikap, pengalaman serta peran yang dimiliki oleh Yuke di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa faktor internal yang menjadi kunci keberhasilan Yuke Yurike pada pemilu tahun 2014. Pertama, persiapan yang lebih matang. Yuke ikut bergabung menjadi tim pemenang Jokowi-Ahok pada PILGUB tahun 2012. Dengan ilmu serta pengalaman yang Yuke dapat, kemudian diterapkan oleh Yuke pada kontestasi legislatif berikutnya di pemilu tahun 2014. Kedua, Yuke menjadi prioritas internal partai. Sistem di internal partai Yuke sendiri ialah memprioritaskan urutan caleg sesuai jabatan dan tingkatan daerah di dalam partai tersebut. Ketiga, Jokowi *effect*. Kemenangan Jokowi-Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap internal partai. Salah satunya ialah partai mendapatkan beberapa keuntungan politik terutama di wilayah DKI Jakarta, seperti penambahan jumlah kursi dari masing-masing dapil dan internal partai PDI-P di DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sangat berpengaruh pada caleg terutama caleg perempuan.

Pada pemilu tahun 2014 berdasarkan data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Yuke berhasil memperoleh jumlah suara sebanyak 8.962 suara. Faktor keberhasilan Yuke selain dari internal, yakni faktor eksternal yang bersumber dari perilaku memilih. Perilaku memilih Yuke

banyak terbentuk melalui pendekatan politik (Campbell, dkk. 1954, 1960, 1966) karena kinerja Yuke dan internal partainya selama di lingkungan masyarakat dan pendekatan sosiologis (Lazarsfeld, dkk. 1954) karena interaksi pribadi dan kesamaan emosi antar perempuan. Sedangkan, terbentuknya perilaku memilih melalui pendekatan kognisi (Houghton. 2009) berupa kegiatan masyarakat yang mengakses media sosial yang tersebar, lalu melakukan evaluasi secara daring (dalam jaringan) dengan informasi yang didapat sehingga tercipta keyakinan dari pemilih kemudian memilih Yuke.

Menurut teori Downs (1957) dalam *The Rational Voter Models*, Alasan serta faktor-faktor terbentuknya perilaku memilih terhadap Yuke dikatakan rasional karena pemilih percaya bahwa Yuke merupakan kandidat yang mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kandidat lain.

Modalitas ekonomi tidak menjadi modalitas yang paling utama bagi Yuke. Sumber modalitas ekonomi Yuke yang paling besar berasal dari dana pribadi. Dalam pengelolaan modalitas ekonomi yang dimiliki Yuke lebih banyak digunakan untuk kebutuhan barang publik atau *public goods*. Pemberian seragam pengajian dan meja pingpong kepada beberapa masyarakat merupakan salah satu bentuk penggunaan modal ekonomi yang dilakukan Yuke untuk kepentingan *public goods*. Yuke tetap mengeluarkan dana untuk kebutuhan kampanye politik seperti pemasangan baliho, spanduk atau atribut lainnya, namun biaya yang dikeluarkan tidak besar dan sebatas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, pengelolaan modal ekonomi Yuke tidak ada yang dipergunakan untuk biaya kompensasi atau ganti rugi terhadap caleg lain dari internal partai dan dapil yang sama. Pada kasus ini terdapat beberapa partai politik lainnya yang menerapkan biaya kompensasi terhadap caleg lain.

PDI-P sendiri sebagai partai politik pengusung Yuke juga tidak memberikan modal ekonomi yang begitu besar kepada setiap calegnya, melainkan hanya sekadar bantuan dana ATK atau administrasi dan sedikit bantuan kampanye seperti spanduk dan sebagainya.

Modalitas budaya yang dimiliki oleh Yuke diantaranya latar belakang pendidikan, gelar akademis, latar belakang keluarga, status sosial, gaya bicara, sikap dan perilaku Yuke. Modal budaya berupa latar belakang pendidikan dan gelar akademis kurang menjadi faktor yang

dipertimbangkan pemilih dalam memilih Yuke.

Latar belakang pendidikan dan gelar akademis yang dimiliki oleh Yuke lebih penting terhadap aspek penilaian internal partai dalam pertimbangan pencalonan caleg. Partai sangat memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh setiap kader, partai beranggapan bahwa menjadi caleg merupakan suatu pekerjaan yang serius sehingga memerlukan pengetahuan serta pengalaman yang mumpuni karena menyangkut hajat orang banyak melalui pembuatan kebijakan yang sesuai untuk membantu masyarakat.

Yuke dikaruniai keluarga yang lengkap serta harmonis dan selalu mendukung penuh atas perjalanan karir politik Yuke dari awal hingga akhir. Faktor latar belakang keluarga Yuke pribadi dinilai oleh para pemilih secara sederhana, di mata masyarakat Yuke berasal dari keluarga yang baik. Penilaian tersebut menjadi sedikit tambahan dari pertimbangan para pemilih terhadap Yuke.

Status sosial yang dimiliki oleh Yuke dinilai oleh beberapa kelompok para pemilih saja, terutama pada pemilih yang berasal dari lingkungan agama. Salah satunya, yakni status sosial Yuke sebagai Hajjah yang ternyata banyak dinilai oleh pemilih di lingkungan agama sekitar. Status sosial yang dimiliki Yuke masih kurang dinilai terhadap mayoritas pemilihnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gaya bicara, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Yuke ternyata menjadi faktor modal budaya yang paling utama terhadap para pemilih.

Tabel 1
Identifikasi Gaya Bicara, Sikap dan Perilaku Yuke Yurike

Gaya Bicara	Sikap	Perilaku
Sederhana	Rendah Hati	Ramah saat berinteraksi dengan masyarakat
Mudah dimengerti	Sabar	Ceria di hadapan masyarakat
Keras	Ikhlas	Mendengarkan keluhan masyarakat
Sopan dan Santun	Tulus	Responsif terhadap pengaduan
	Tabah	Menghargai perbedaan yang ada di masyarakat
	Peduli	Cerdas dalam mencari solusi
		Bijak dalam mengambil keputusan

Sumber: Wawancara (olahan penulis)

Terdapat dua bentuk modal sosial yang paling kuat dibandingkan modal lainnya sebagai faktor utama kemenangan Yuke. Bentuk usaha Yuke dalam modal sosial yang pertama adalah penjaringan (*networking*). Yuke paling besar berharap dan bergantung pada seluruh jaringan yang dimiliki, baik jaringan lama sejak masa sekolah dan kuliah ataupun jaringan baru. Jaringan yang dimiliki Yuke kebanyakan berasal dari organisasi yang diikuti dan lingkungan sekitar bukan berasal dari internal partai.

Bentuk usaha modal sosial Yuke yang kedua adalah membangun kepercayaan (*trust*). Cara Yuke dalam membangun kepercayaan adalah dengan intens turun ke masyarakat termasuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat dari internal partai ataupun pribadi Yuke, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal sosok, dan karakter Yuke. Selain itu, dukungan berupa kepercayaan melalui keanggotaan dan kepengurusan organisasi serta internal partai menjadi nilai tambahan dalam modal sosial Yuke.

Dukungan kepercayaan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat menjadi salah satu modal sosial yang juga tak kalah penting sebagai tambahan nilai yang dimiliki Yuke. Yuke membangun hubungan dengan tokoh atau kelompok masyarakat dengan cara menjalin mitra kerja terkait kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Setiap ada keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada tokoh dan kelompok masyarakat pasti akan selalu diteruskan kepada Yuke, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, dampak dari hasil komunikasi dan koordinasi yang intens maka terbentuklah mitra kerja dan dukungan kepercayaan tokoh dan kelompok masyarakat yang baik dan berkelanjutan kepada Yuke.

Strategi ofensif yang digunakan oleh Yuke dapat dilihat dari bentuk kegiatan-kegiatan politik yang bertujuan untuk menembus dan memperluas pasar atau para pemilihnya, seperti pemetaan, penjaringan, kampanye, personal branding, dan metode kegiatan politik lainnya

Strategi kemenangan Yuke beserta tim diawali dengan melakukan pemetaan (*mapping*). Pemetaan tersebut bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana kondisi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dapilnya untuk menentukan langkah selanjutnya seperti pemilihan visi misi, program kerja, metode kampanye dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Langkah selanjutnya adalah menerapkan semua hasil dari pemetaan tersebut dengan turun langsung

melakukan kegiatan penjaringan dan kampanye lebih lanjut.

Metode kampanye Yuke dan tim saat itu untuk memperluas dan menembus basis pemilihnya yang paling besar ialah menggunakan metode konvensional atau secara langsung dengan menyelenggarakan beberapa acara khusus sesuai dengan kondisi permasalahan dan kebutuhan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, atau sekadar berkumpul dengan masyarakat. Usaha lain yang dilakukan Yuke dan tim ialah menggunakan metode *door to door*. Cara tersebut juga dinilai lebih efektif untuk memperluas basis baru dan menembus basis lawan. Yuke dan tim juga melakukan kegiatan kampanye konvensional melalui penggunaan atribut kampanye, seperti pemasangan baliho, penyebaran poster, kaos dan sebagainya.

PDI-P sendiri memiliki strategi kampanye khusus untuk para calegnya yang disebut dengan “kampanye tandem”. Kampanye tandem yang dimaksud ialah antar caleg internal partai baik caleg DPR RI maupun DPRD diharuskan untuk saling membantu atau gotong royong, komunikasi, koordinasi dan bersinergi selama masa kontestasi. Tujuan dari kampanye ini antara lain untuk mencegah terjadinya pelapisan serta perebutan suara dan menghasilkan pemerataan caleg di setiap daerah pemilihan.

Yuke dan tim tetap menggunakan sosial media sebagai sarana kampanye dan membangun *personal branding*, akan tetapi tidak terlalu intens dan eksis karena dinilai masih kurang efektif untuk menjangkau basis pemilihnya dibandingkan metode kampanye lainnya. PDI-P juga memiliki metode *personal branding* untuk para calegnya, seperti memberikan dukungan sepenuhnya dengan menggunakan media sosial internal partai untuk membangun *personal branding* para caleg.

Yuke pribadi beranggapan bahwa untuk mempertahankan dan merawat konstituen merupakan suatu hal yang sangat sulit karena tidak ada pola atau rumusannya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Yuke untuk mempertahankan dan merawat konstituen diantaranya melalui kinerja yang baik dan komunikasi yang intens kepada masyarakat. Selain itu, usaha Yuke juga dilakukan dengan menjalin komunikasi secara intens baik melalui komunikasi langsung secara tatap muka ataupun tidak langsung melalui kontak pribadi dan akun media sosial yang ada.

B. Perjalanan Kemenangan Wa Ode Herlina Tahun 2019

Wa Ode memiliki kedua orang tua yang suka bersosialisasi dan berorganisasi di lingkungan masyarakat, hal ini juga didukung dengan kedua orang tua Wa Ode yang tergabung ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) di Buton, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, sikap kritis dan jiwa sosial untuk mengabdikan kepada masyarakat yang dimiliki oleh Wa Ode diturunkan dari kedua orang tuanya.

Sebelum menjadi seorang anggota dewan, Wa Ode berprofesi sebagai seorang penjahit atau *fashion designer*. Awal perjalanan karir politik Wa Ode dimulai pada tahun 2004 ketika Wa Ode dicalonkan oleh internal partai pertama kali untuk mengikuti kontestasi legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2004 Wa Ode mendapatkan nomor urut 3 dan daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta 1 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, sayangnya pada kesempatan tersebut Wa Ode belum berhasil. Selanjutnya, Wa Ode mengikuti kembali pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 dengan nomor urut dan dapil yang sama, akan tetapi Wa Ode masih belum beruntung untuk memenangkan kontestasi tersebut. Kemudian, pada pemilu legislatif tahun 2019 Wa Ode mencoba kembali untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan dengan nomor urut dan dapil yang masih sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, di kesempatan kali ini Wa Ode berhasil memenangkan kontestasi tersebut.

Terdapat beberapa faktor internal partai PDI-P dalam mencalonkan Wa Ode saat pertama kali hingga terus dicalonkan meski mengalami kegagalan, pertama Wa Ode merupakan kader perempuan yang paling senior. Kedua, Wa Ode merupakan kader perempuan yang memiliki loyalitas dan dedikasi sangat tinggi terhadap internal partai. Ketiga, Wa Ode merupakan kader perempuan yang sangat potensial.

Selain itu, terdapat beberapa faktor kegagalan Wa Ode. Pertama, kalah saing dengan kompetitor di internal maupun eksternal partai. Kedua, kurangnya kerjasama internal dan eksternal partai serta strategi kemenangan yang masih belum tepat. Ketiga, kondisi politik di Indonesia terhadap pemilu yang dinamis. Kondisi politik pada saat itu masih sangat dinamis terhadap sistem pemilu, salah satunya adalah terhadap peraturan dan penegakkan yang belum tegas mengenai larangan *money politics* terhadap peserta pemilu sehingga banyak caleg yang kalah saing dengan modalitas ekonomi yang digunakan oleh caleg lain untuk membeli suara pemilih.

Keempat, euforia pemilu legislatif 1999. PDI-P menjadi salah satu peserta pemilu partai politik baru yang berhasil memenangkan pemilu legislatif 1999, karena internal partai terlalu berlarut-larut merayakan euforia kemenangan tersebut sehingga dari internal partai kurang melakukan *maintanance* basis partai kembali yang berdampak pada kehilangan beberapa jumlah kursi caleg terutama caleg perempuan di pemilu berikutnya tahun 2004.

Berdasarkan teori tiga asumsi yang mendasari terbentuknya sikap politik politisi (Josh & Sidanius. 2004). Alasan atau keputusan Wa Ode untuk kembali mencoba kontestasi legislatif sebagai caleg pada pemilu tahun 2019 pasca kegagalan di pemilu sebelumnya termasuk ke dalam alasan yang bersumber dari asumsi keyakinan politik yang dipercaya (*political belief*) meliputi pandangan, nilai, sikap, pengalaman serta peran yang dimiliki oleh Wa Ode di dalam masyarakat.

Kemudian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan Wa Ode pada pemilu tahun 2019. Pertama, terletak pada perubahan peraturan dan penegakkan sistem pemilu yang lebih tegas di Indonesia. Kedua, perubahan strategi pemenangan internal partai dan caleg. Ketiga, Jokowi *effect*. Kemenangan Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia periode kedua pada tahun 2019 ternyata masih memberikan dampak yang sangat besar terhadap internal partai. Salah satunya ialah partai mendapatkan beberapa keuntungan politik terutama di lembaga legislatif baik di tingkat DPR maupun DPRD.

Pada pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wa Ode Herlina berhasil memperoleh jumlah suara sebanyak 8.851 suara. Faktor keberhasilan Wa Ode Herlina selain dari internal, yakni faktor eksternal yang bersumber dari perilaku memilih. Perilaku memilih Wa Ode banyak terbentuk melalui pendekatan politik (Campbell, dkk. 1954, 1960, 1966) karena kinerja Wa Ode dan internal partainya selama di lingkungan masyarakat dan pendekatan sosiologis (Lazarsfeld, dkk. 1954) karena interaksi pribadi dan kesamaan emosi antar perempuan. Sedangkan, terbentuknya perilaku memilih melalui pendekatan kognisi (Houghton. 2009) berupa kegiatan masyarakat yang mengakses media sosial yang tersebar, lalu melakukan evaluasi secara daring (dalam jaringan) dengan informasi yang didapat sehingga tercipta keyakinan dari pemilih kemudian memilih Wa Ode.

Menurut teori Downs (1957) dalam *The Rational Voter Models*, Alasan serta faktor-faktor terbentuknya perilaku memilih terhadap Wa Ode dikatakan rasional karena pemilih percaya bahwa Wa Ode merupakan kandidat yang mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kandidat lain.

Wa Ode tidak memiliki persiapan finansial khusus sebagai caleg. Ketika menjadi caleg Wa Ode menggunakan modal ekonomi sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, modalitas ekonomi tidak menjadi modalitas yang paling utama dalam kontestasi legislatif Wa Ode. Sumber modalitas ekonomi Wa Ode yang paling besar berasal dari dana pribadi.

Pengelolaan modal ekonomi yang dimiliki oleh Wa Ode mayoritas digunakan untuk kebutuhan yang bersifat penting dan dapat digunakan bersama di lingkungan masyarakat seperti barang-barang publik atau yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Wa Ode menyebutnya sebagai investasi sosial dibandingkan dengan investasi ekonomi.

Wa Ode tidak terlalu mengutamakan penggunaan modal ekonomi untuk kebutuhan politik pribadi seperti kampanye dan sebagainya. Sumber logistik berupa bantuan untuk masyarakat dan atribut kampanye Wa Ode lebih banyak didapatkan dari internal partai, namun partai juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu intens memberikannya kepada Wa Ode karena partai memiliki prinsip bahwa setiap caleg wajib untuk berjuang sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Modalitas kedua yang dimiliki oleh Wa Ode Herlina adalah modal budaya. Modalitas budaya yang dimiliki oleh Wa Ode diantaranya latar belakang pendidikan, gelar akademis, latar belakang keluarga, status sosial, gaya bicara, sikap dan perilaku Yuke.

Wa Ode percaya meskipun latar belakang pendidikan dan gelar akademis yang dimilikinya kurang dinilai secara langsung terhadap pemilihnya, namun tetap penting terhadap perkembangan kemampuan personal Wa Ode. Dengan adanya pendidikan dan gelar akademis yang dimiliki oleh Wa Ode, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri, wawasan, pola pikir dan komunikasi sehingga berpengaruh terhadap hasil kinerja Wa Ode sebagai caleg maupun anggota dewan di masyarakat. Sedangkan, latar belakang pendidikan dan gelar akademis yang dimiliki oleh Wa Ode lebih penting terhadap aspek pembobotan nilai caleg di internal partai.

Jika melihat latar belakang keluarga Wa Ode dari sisi identitas sukunya, hal tersebut tidak dinilai sama sekali dengan para pemilihnya. Mayoritas pemilih Wa Ode melihat dari kondisi dan keseharian keluarga Wa Ode di lingkungan masyarakat. Wa Ode sendiri berasal dari kondisi keluarga yang baik, artinya saling dukung, saling menyayangi, saling membantu dan harmonis sehingga dapat membentuk karakter Wa Ode yang baik juga di lingkungan masyarakatnya.

Sedangkan, status sosial yang dimiliki oleh Wa Ode kurang dinilai terhadap mayoritas pemilihnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gaya bicara, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Wa Ode ternyata menjadi faktor modal budaya yang paling utama terhadap para pemilih.

Tabel 2

Identifikasi Gaya Bicara, Sikap dan Perilaku Wa Ode Herlina

Gaya Bicara	Sikap	Perilaku
Sederhana	Rendah Hati	Ramah saat berinteraksi dengan masyarakat
Mudah dimengerti	Sabar	Ceria di hadapan masyarakat
Keras	Ikhlas	Mendengarkan keluhan masyarakat
Sopan dan Santun	Tulus	Responsif terhadap pengaduan
	Tabah	Menghargai perbedaan yang ada di masyarakat
	Peduli	Cerdas dalam mencari solusi
		Bijak dalam mengambil keputusan

Sumber: Wawancara (olahan penulis)

Wa Ode membangun kepercayaan dengan cara turun langsung ke masyarakat dan memperbanyak hasil nyata dari kinerja Wa Ode di lingkungan masyarakat. Selain itu, Wa Ode membangun kepercayaan dan dukungan anggota dan pengurus di internal partai adalah dengan menjalin dan merawat hubungan yang baik antar anggota atau pengurus dan menunjukkan konsistensinya sebagai caleg dengan memberikan banyak dedikasi dan loyalitas kepada internal partai. Kemudian, Wa Ode membangun kepercayaan para tokoh dan kelompok masyarakat adalah dengan menjalin hubungan dan komunikasi jangka panjang berupa mitra kerja terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu, PDI-P juga memiliki upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai program untuk masyarakat

seperti kunjungan, dan kegiatan sosial lainnya yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi permasalahan yang ada di masyarakat.

Metode kampanye lainnya yang didapatkan oleh Wa Ode dari internal PDI-P juga sama yang disebut dengan “kampanye tandem”. Wa Ode kerap melakukan kerjasama dengan caleg DPR RI PDI-P yang termasuk ke dalam dapil DKI Jakarta 1 atau Jakarta Pusat dalam berkampanye dan melakukan kegiatan politik lainnya selama kontestasi berlangsung.

Strategi kemenangan Wa Ode beserta tim yang paling utama adalah mengandalkan modal sosial, yakni dengan investasi sosial. Wa Ode menjalin komunikasi dan hubungan yang intens dan berkelanjutan dengan tokoh-tokoh, kelompok dan masyarakat. Wa Ode berusaha untuk selalu hadir untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Wa Ode beserta tim lebih banyak menggunakan metode kampanye konvensional atau secara langsung. Tim Wa Ode melakukan kampanye dengan mendatangi masyarakat, kemudian mengenalkan Wa Ode sebagai caleg termasuk menyampaikan visi misi, program kerja, *track record* dan sebagainya.

Wa Ode dan tim juga intens melakukan kampanye secara *door to door*. Ketika turun di salah satu kelurahan dapilnya Wa Ode selalu mengunjungi seluruh RW yang ada, sedangkan di dapil Wa Ode sendiri memiliki sebanyak 44 kelurahan yang seluruhnya dikunjungi oleh Wa Ode dari pagi sampai malam. Selain itu, Wa Ode dan tim juga melakukan kampanye dengan atribut politik seperti spanduk, *flyer*, kaos, dan sebagainya yang disebar kepada masyarakat dengan jumlah yang tidak begitu banyak karena kurang menjadi prioritas Wa Ode dan tim dalam strategi kemenangannya.

Wa Ode dan tim juga menggunakan media sosial sebagai media kampanye dan membangun *personal branding* kepada masyarakat. Dalam membangun *personal branding* Wa Ode menunjukkan karakter yang mudah berbaur, konsisten, memiliki pendirian, dan tegas kepada masyarakat. Internal PDI-P juga menggunakan media sosial yang ada untuk membangun *engagement* para caleg kepada masyarakat, seperti menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait hasil kinerja yang dicapai oleh para caleg, visi misi, program kerja dan sebagainya.

Adapun usaha Wa Ode beserta timnya dalam mempertahankan dan merawat konstituennya pasca mengalami kegagalan dengan membangun jaringan sosial yang kuat. Cara Wa Ode membangun jaringan yang kuat adalah membentuk kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Wa Ode juga berusaha dengan melakukan komunikasi yang intens secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Wa Ode juga berusaha terus memberikan hasil kinerja yang maksimal kepada masyarakat karena kinerja yang baik juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan pemilih yang tetap utuh kepada Wa Ode.

KESIMPULAN

Terdapat beragam cerita perjuangan politisi perempuan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang luar biasa tersebut terletak pada durasi waktu perjuangan, dinamika politik yang terjadi, kondisi masyarakat yang berbeda, dan pengalaman pribadi atas kegagalan caleg sehingga dari perjuangan tersebut memengaruhi berbagai faktor dan *struggle for power* yang dimiliki oleh setiap caleg. Peneliti menemukan bahwa modalitas dan strategi pemenangan menjadi *struggle for power* yang paling kuat atau mendominasi terhadap perjuangan kedua caleg tersebut.

Modal sosial menjadi modalitas yang paling kuat terhadap faktor keterpilihan kedua caleg. Bentuk dari modal sosial itu sendiri berupa kepercayaan dan jaringan sosial caleg. Peneliti juga menemukan *struggle for power* terhadap modalitas lain, seperti modal ekonomi dan budaya. Modal ekonomi dipakai oleh caleg dalam melakukan kegiatan politik seperti kampanye dan perawatan terhadap jaringan sosial yang ada. Sedangkan, peneliti melihat beberapa modal budaya terhadap kemenangan caleg diantaranya melalui latar belakang pendidikan, gelar akademis, latar belakang keluarga, status sosial, dan gaya bicara, sikap dan perilaku caleg di masyarakat.

Struggle for power dari segi strategi pemenangan caleg, peneliti menemukan bahwa kedua caleg tersebut menggunakan strategi campuran, yakni gabungan dari strategi ofensif dan strategi defensif dengan jumlah strategi ofensif yang lebih banyak. Strategi ofensif yang dilakukan oleh caleg seperti investasi sosial dan kegiatan politik lainnya termasuk segala bentuk kampanye. Sedangkan, strategi defensif yang dilakukan adalah melalui perawatan-perawatan terhadap jaringan sosial atau konstituennya.

Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa faktor selain *struggle for power* dari segi modalitas dan strategi kemenangan, yaitu sikap politik caleg dan perilaku memilih menjadi faktor psikologis yang memengaruhi perjuangan kedua caleg tersebut. Peneliti menemukan bahwa hasil dari sikap politik yang terbentuk dari kedua caleg adalah sama, yakni alasan atau faktor yang memengaruhi keputusan caleg tersebut untuk mencalonkan diri lagi setelah mengalami kegagalan karena keyakinan politik (*political belief*) yang dimilikinya, yang dimana meliputi pandangan, nilai-nilai, sikap, pengalaman dan peran yang dimiliki oleh caleg.

Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang memengaruhi dari terbentuknya perilaku memilih caleg diantaranya didasarkan oleh pendekatan politik, pendekatan sosiologis, dan pendekatan psikologis. Pendekatan politik berupa kinerja caleg dan internal partai di masyarakat dan pendekatan sosiologis berupa interaksi pribadi, kesamaan gender dan emosional terhadap caleg di masyarakat. Sedangkan, pada pendekatan psikologis berupa kognisi juga kerap menjadi faktor terbentuknya perilaku memilih caleg meskipun bukan yang utama.

Kemudian, tindakan rasional juga termasuk ke dalam pendekatan psikologis dalam perilaku memilih. Peneliti menemukan bahwa faktor-faktor terbentuknya perilaku memilih terhadap kedua caleg termasuk ke dalam alasan yang rasional. Dikatakan rasional karena para pemilih percaya bahwa caleg tersebut merupakan kandidat yang mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan kandidat lainnya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneruskan penelitian ini menggunakan metode lain seperti kuantitatif atau gabungan keduanya, dan teori lainnya agar penelitian yang dihasilkan lebih luas, bervariasi dan mendalam.

2. Para caleg, terutama caleg perempuan disarankan untuk memanfaatkan penggunaan modal ekonomi dengan sebaik-baiknya, mengingat kondisi politik dan masyarakat yang semakin dinamis sehingga memerlukan modal ekonomi yang lebih kuat kedepannya agar modalitas lainnya dapat saling berpengaruh secara efektif dan efisien.
3. Partai politik disarankan untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan posisi perempuan sebagai kader maupun caleg agar memiliki hak yang sama dengan pihak laki-laki atas kesempatan dan peluang yang besar dalam lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, W. (2015). KEGAGALAN CALEG PETAHANA DALAM PILEG DPRD JAWA TENGAH 2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1(1): 110-115.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badan Pusat Statistik. (2024). "Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2022-2023". Artikel. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html> tanggal 1 September 2024.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital." Pp. 241-258 in *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deborahana (2019). PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS DAPIL 2 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019. *Jurnal S1 Ilmu Politik* 7(3): 1-20.
- Effendi, O. 2024. *Psikologi Politik*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Field, J. 2003. *Modal Sosial (Ter)*. London: Kreasi Wacana.
- Firmansyah, J., & Shafira, F. (2022). MODAL POLITIK KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Trias Politika* 6(1): 88-103.
- Firmansyah, J., Leni, N. K., & Gita, R. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota

- Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. JPK (Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan) 4(1): 1-14.
- Izdiha, A. (2017). Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Pemikiran Sosiologi 4(2): 36-47.
- John, T. J., & Jim, S. 2004. *Political Psychology*. New York: Psychology Press.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana
- Khoiron & Ahmad, S. (2018). Kemenangan Petahana (Incumbent) Pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) 3(1).
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 14(1).
- Lagos State University. (2015). "Religion, leadership and struggle for power in Nigeria: A case study of the 2011 presidential election in Nigeria". Artikel. Diakses dari https://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S1017-04992015000200014&script=sci_arttext tanggal 1 September 2024.
- Madu, L. (2016). Media Business and Political Business: The Struggle for Power Towards the 2014 Presidential Election in Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi 14(3): 185-194.
- Muluk, H. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Niffenegger, P. B. (1988). Strategies for Success From The Political Marketers. Journal of Services Marketing 2(3): 15-21.
- Rafsanjani, M. A., Fitriyah, & Nur H. S. (2023). Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah). Journal of Politic and Government Studies 12(3): 561-575.
- Rahmaturrizqi, C. N., & Fathul, L. N. (2012). Gender dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik. Jurnal Psikologi: Teori & Terapan 3(1): 49-57.
- Thufail, D. S. A. (2025). DIBALIK KEKALAHAN CALEG PEREMPUAN TETAP NYALEG: STUDI FENOMENOLOGIS CALEG KALAH DALAM PILEG. Journal of Politic and Government Studies 14(1): 573-590.
- Universitas Airlangga. (2022). "Political Ethnography and Researchers' Adaptation in Field". Artikel. Diakses dari <https://s3ilmusosial.fisip.unair.ac.id/political-ethnography-and-researchers-adaptation-in-field/> tanggal 1 September 2024.
- Universitas Indonesia. (2024). "Psikologi Politik dan Pemilihan Umum". Artikel. Diakses dari <https://psikologi.ui.ac.id/2024/02/07/psikologi-politik-dan-pemilihan-umum/> tanggal 1 September 2024.